

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ahmad Yani Web : <http://dpmpstsp.mamujukab.go.id> email : [dpmpstsp@mamujukab.go.id](mailto:dpmpstsp@mamujukab.go.id) Mamuju 91511

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 - 2006**

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju  
 Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah  
 Indikator Tujuan : Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA Target : 15 %  
 Sasaran Strategis :  
 1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal  
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal  
 3. Terselenggaranya Birokrasi DPMPTSP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	TARGET WAKTU	KET
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	Milyar/ Rupiah	310	325	340	355	360	375	<b>Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)</b>  Definisi operasional jumlah nilai investasi PMDN/PMA yaitu dihitung berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	12 Bulan	Eselon II
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	80	90	90	90	90	90	<b>Nilai Skor IKM</b>  Definisi Opearsional IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	Eselon II

3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	A	<p style="text-align: center;"><b>Ada/Tidak</b></p> Defisini Operasional Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik	HasilNilai Evaluai dari Inspektorat	12 Bulan	Eselon II
---	---	-------------------	----------	---	---	---	---	----	---	--	-------------------------------------	----------	-----------

KEPALA DINAS

**H. HASNAWATY SYAM, S.E.M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c

NIP. 19680928 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ahmad Yani Web : <http://dpmpstp.mamujukab.go.id> email : [dpmpstp@mamujukab.go.id](mailto:dpmpstp@mamujukab.go.id) Mamuju 91511

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. MAMUJU TAHUN 2021 - 2026**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET						FORMULASI / Definisi Operasional	SUMBER DATA	TARGET WAKTU	KET
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	Terciptanya Iklim yang Kondusif untuk Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang tersedia}}{\text{Jumlah Dokumen target}} \times 100\%$ <p>Definisi Opearional Dokumen Penanaman Modal adalah Jumlah dokumen yang menyangkut tentang Penanaman Modal seperti RUPM,Peta Potensi dan Peraturan Daerah yang mengenai Penanaman Modal</p>	Laporan Kegiatan DPMPSTP	12 Bulan	Eselon III
2	Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Jumlah peningkatan investor	Investor	35	39	44	51	59	65	<p><b>Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)</b></p> <p>Definis Opearional Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA)</p>	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	12 Bulan	Eselon III
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tahun berjalan}}{\text{Target Jumlah Perizinan dan Non Perizinan}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah keseluruhan Jumlah izin yang terbit melalui sistem OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</p>	Data Laporan Perizinan	12 Bulan	Eselon III

										Target jumlah perizinan dan Non perizinan yang dimaksud adalah Jumlah target Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik yang sudah ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50	50	50	50	50	50	<p><b>Jumlah perizinan + non perizinan + LKPM yang dimonev</b></p> <hr/> <p><b>X 100%</b></p> <p><b>jumlah total Target Pengawasan</b></p> <p>Definisi Operasional Jumlah Perizinan, Non Perizinan dan LKPM adalah seluruh jumlah NIB yang terdapat pada aplikasi OSS baik reziko tinggi, menengah tinggi dan Rendah yang ada di wilayah Kab.Mamuju</p> <p>Definisi Operasional Target Pengawasan adalah Jumlah target Perizinan, Non Perizinan dan LKPM yang diawasi Pada Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal</p>	Data Laporan Penanaman Modal	12 Bulan	Eselon III
5	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase laporan data base perizinan dan non perizinan	Persen	100	100	100	100	100	100	<p><b>Jumlah laporan yang tersedia</b></p> <hr/> <p><b>X 100%</b></p> <p><b>Jumlah Laporan (12 Laporan )</b></p> <p>Definisi Operasional Laporan database Perizinan dan Non Perizinan adalah seluruh data perizinan dan non perizinan setiap bulan yang diambil /ditarik datanya dari baik dari aplikasi OSS, Sican tik dan Simb g.</p>	Laporan Data DPMTSP	12 Bulan	Eselon III
6	Tercapainya Target Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Secara Akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	<p><b>Realisasi kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah</b></p> <hr/> <p><b>X 100%</b></p> <p><b>Jumlah Kegiatan Penunjang urusan pemerintah daerah</b></p> <p>Definisi Operasional Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Seluruh kegiatan rutin yang mendukung Pemerintah Daerah dalam hal ini di Sekretariat.</p>	Laporan data DPMTSP	12 Bulan	Eselon III
7	Tersedianya penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100	100	<p><b>jumlah regulasi yang tersedia</b></p> <hr/> <p><b>X 100%</b></p> <p><b>Jumlah Target</b></p>	Laporan data DPMTSP	12 Bulan	Jabatan Fingsional

	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										Definisi Operasional Persentase Regulasi Urusan Penanaman Modal adalah Persentase seluruh jumlah regulasi yang tersedia terkait kegiatan penanaman modal .			
8	Ditetapkannya kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	3	3	2	1	1	1	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Regulasi yang tersedia</b></p> <p>Definisi Operasional Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Pemberian fasilitas /insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakatdan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakatdan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah sedangkan Penanaman Modal yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam Daerah maupun penanam modal dari luar Daerah untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten</p>	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
9	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	Persen	100	100	100	100	100	100	100	<p style="text-align: center;"><b>jumlah peta potensi yang tersedia dibagi</b></p> <p style="text-align: center;">_____ x 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Target</b></p> <p>Definisi Operasional Persentase Peta Potensi adalah Persentase dokumen potensi investasi ( Dokumen RUPM dan Dokumen Peta Potensi)</p>	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
10	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perda yang tersedia</b></p> <p>Definisi operasional Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota</p>	Laporan data DPMPSTP	2021 s/d2026	Jabatan Fungsional

										Definisi Operasional Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan			
11	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	<b>Jumlah Dokumen Peta Potensi yang tersedia</b> Definisi operasional Dokumen Peta Potensi adalah Dokumen yg disusun untuk menggambarkan kegiatan ekonomi yang sedang tumbuh di Daerah Kab.Mamuju dan juga potensi pengembangan berbagai sektor ekonomi Kab.Mamuju	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
12	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi diikuti	Persen	33	33	33	33	33	33	<b>Jumlah Promosi yang diikuti</b>  <b>Jumlah rencana promosi yang ada</b> x 100%  Definisi Operasional Persentase Promosi Investasi adalah persentase seluruh promosi baik itu pameran, workshop maupun event - event penanaman modal yang diikuti	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
13	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	<b>Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota</b> Definisi Operasional Promosi Investasi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri (Investor) Adapun pada promosi ini berfokus pada : Analisis Potensi Investasi dan Perencanaan strategi promosi (penyusunan profil investasi)  Perda yang mengatur promosi penanaman modal adalah Aturan -aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan daerah mengenai promosi penanaman modal	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
14	Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	Persen	100	100	100	100	100	100	<b>Semua Perizinan Umum yang Terlayani dengan online</b>  Definisi operasional Perizinan umum adalah seluruh izin yang terlayani secara online	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional

15	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	80	85	90	97	100	105	<p><b>Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh NIB</b></p> <p>Definisi operasional Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu</p> <p>Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
16	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Keg. Usaha	58	360	100	110	120	130	<p><b>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha</b></p> <p>Definisi Operasional pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk memonitoring seluruh jumlah kegiatan usaha yang telah atau belum memenuhi komitmen / kepatuhan berusaha</p>	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
17	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	20	22	24	26	28	30	<p><b>Jumlah layanan Konsultasi yang sudah ditindaklanjuti</b></p> <p>Definisi operasional Layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha mengenai perizinan dan ditindaklanjuti</p>	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
18	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	3	3	2	1	1	<p><b>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</b></p> <p>Definisi operasional yang dimaksud adalah kegiatan yang memberikan fasilitas atau kemudahan bagi pelaku usaha dalam proses perizinan usahanya.</p>	Laporan data DPMPSTP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
19	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM (	Persen	65	70	75	85	90	100	<p><b>Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)</b></p>	Data Laporan Kegiatan Penanaman	12 Bulan	Jabatan Fungsional

	yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Penanaman Modal)								Definisi operasional LKPM laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala .Persentasenya didapat dari Jumlah kegiatan usaha yang dilaporkan dibagi dengan Jumlah kegiatan usaha yang wajib LKPM X 100%	Modal (LKPM)		
20	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Keg. Usaha	10	12	12	15	15	15	<b>Jumlah Kegiatan Usaha yang telah diselesaikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha</b>	Data Laporan Penanaman Modal	12 Bulan	Jabatan Fungsional
										Definisi operasional Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dilakukan melalui rapat/ pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait, atau narasumber dengan tahapan identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya			
21	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	1	260	260	260	260	260	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi</b>  Deinisi Opearional Kegiatan bimbingan teknis meliputi: a. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan b. bimbingan teknis/sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);	Data Laporan Penanaman Modal	12 Bulan	Jabatan Fungsional
22	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Keg. Usaha	11	12	12	13	13	13	<b>Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan</b>  Definisi opearional Pengawasan adalah upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan Data Penanaman Modal	12 Bulan	Jabatan Fungsional
23	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah laporan yang tersedia dibagi  ————— X 100%  target (12 laporan)	Laporan Data Bidang Data/ Informasi	12 Bulan	Jabatan Fungsional

	Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota									Definisi Operasional Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan yang dimaksud adalah keseluruhan Rekap data perizinan dan non perizinan dibagi dengan 12 bulan laporan dikali 100%			
24	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	<b>Jumlah Dokumen yang tersedia</b>  Definisi Operasional Dokumen yang dimaksud adalah seluruh Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan yang telah direkap perbulan.	Laporan Data Bidang Data/ Informasi	12 Bulan	Jabatan Fungsional
25	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	<b>Ada/Tidak</b>  Definisi Operasioal Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yaitu Seluruh dokumen perencanaan yang tersedia dibagi jumlah dokumen perencanaan yang menjadi target Tahun berjalan.	Laporan DPMTSP	12 Bulan	Eselon IV
26	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	2	2	2	3	<b>Ada/Tidak</b>  Definisi operasional Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Dokumen Renstra, Renja Pokok, dan Renja Perubahan	Laporan DPMTSP	2 Bulan	Eselon IV
27	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	<b>Ada/Tidak</b>  Definisi operasional RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	Laporan DPMTSP	2 Bulan	Eselon IV
28	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	<b>Ada/Tidak</b>  Definisi operasional RKA Perubahan adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	Laporan DPMTSP	2 Bulan	Eselon IV
29	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	<b>Ada/Tidak</b>  Definisi operasional DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran	Laporan DPMTSP	1 Bulan	Eselon IV

30	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	<b>Ada/Tidak</b>	Laporan DPMPSTSP	1 Bulan	Eselon IV
										Definisi operasional DPA Perubahan adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran, dalam Pelaksanaannya mengalami berbeda dengan kondisi di lapangan sehingga membutuhkan penyesuaian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).			
31	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	<b>Ada/Tidak</b>	Laporan DPMPSTSP	1 Bulan	Eselon IV
										Definisi operasional Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu Laporan Lakip yang merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
32	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	4	<b>Ada/Tidak</b>	Laporan DPMPSTSP	4 Bulan	Eselon IV
										Definisi operasional Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Dokumen LKPJ, LPPD, Realisasi Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Renja			
33	Tersedianya dokumen pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	<b>Ada/Tidak</b>	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
										Definisi operasional Persentase Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu seluruh dokumen keuangan yang tersedia dibagi dengan rencana dokumen keuangan dikali 100%			
34	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	Orang/Bulan	38	38	38	38	38	38	<b>Ada/Tidak</b>	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Jabatan Fungsional
										Definisi Opearsional Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan sedangkan Definisi operasional Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja setiap bulan			
35	Terlaksananya Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	<b>Ada/Tidak</b>	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Jabatan Fungsional

	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD								<p>Definisi operasional Dokumen penatausahaan adalah Dokumen - dokumen yang terdiri dari atas</p> <p>1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terdiri atas :</p> <p>a) SPP-Uang Persediaan (SPP-UP);</p> <p>b) SPP-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU);</p> <p>c) SPP-Tambahan Uang (SPP-TU);</p> <p>d) SPP-Langsung (SPP-LS);</p> <p>e) Register SPP;</p> <p>2) Surat Perintah Membayar (SPM);</p> <p>3) Register SPM;</p> <p>4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);</p> <p>5) Register SP2D;</p> <p>6) Buku Kas Umum;</p> <p>7) Buku Simpanan/Bank;</p> <p>8) Buku Panjar;</p> <p>9) Buku Pajak/PPN/PPH;</p> <p>10) Register Penutupan Kas;</p> <p>11) Perincian Pengeluaran per Rincian Obyek</p> <p>Definisi operasional Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yaitu salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku</p>			
36	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	14	2	2	2	2	2	<p><b>Ada/Tidak</b></p> <p>Definisi operasional Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/semesteran adalah tersusunnya laporan keuangan bulanan meliputi realisasi keuangan setiap bulan dan tiap semester.</p>	Laporan DPMPSTP	1 Bulan	Jabatan Fungsional
37	Tersedianya dokumen pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	<p><b>Jumlah Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dibagi target x 100%</b></p> <p>Definisi Operasional Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yaitu Persentase seluruh laporan aset yang direkap per triwulan.</p>	Laporan DPMPSTP	12 Bulan	Eselon IV
38	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4	4	4	4	4	4	<p><b>Ada/Tidak</b></p> <p>Definisi operasional Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah</p>	Laporan DPMPSTP	12 Bulan	Eselon IV

39	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah dibagi jumlah target rencana x 100%</b>  Definisi operasional ketersediaan barang milik daerah yaitu jumlah pengadaan yang tersedia dikantor	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Eselon IV
40	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Eselon IV
										Definisi operasional yang dimaksud adalah pengadaan laptop/notebook, komputer/PC, printer dan mesin lainnya yang bermanfaat untuk kantor			
41	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	<b>Jumlah penyediaan dokumen administrasi dibagi target x 100%</b>  Definisi operasional Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian yaitu Segala dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia dibagi target dokumen dikali dengan 100%	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Eselon IV
42	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	38	38	38	38	38	38	<b>Jumlah ASN dan kelengkapan administrasi kepegawaian</b>  Definisi operasional Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yaitu seluruh data yang berkaitan dengan kepegawaian	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Eselon IV
43	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	1	1	1	1	<b>Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>  Definisi operasional Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud suatu persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan, keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kerja yang sesungguhnya terinci dan rutin agar dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya meliputi Dilatpim I, II, III dan IV	Laporan DPMPPTSP	6 Bulan	Eselon IV
44	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	<b>Jumlah penyediaan jasa administrasi yang ada di kantor dibagi target x100%</b>  Definisioperasional Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas meliputi penyediaan peralatan, penggunaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang telah dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Eselon IV
45		Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	24	10	10	10	10	10	<b>Ada/Tidak</b>	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Eselon IV

	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan								Definisi operasional Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah meliputi peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor			
46	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	<b>Ada/Tidak</b> Definisi operasional Barang Cetak dan Penggandaan yaitu meliputi jilid, fotocopy, spanduk, baliho dan belnaja cetak lainnya	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
47	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	20	25	25	30	30	<b>Ada/Tidak</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD meliputi rapat - rapat yang dilaksanakan didalam kota maupun luar kota	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
48	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>  <b>X 100%</b> <b>Jumlah Target Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>  Definisio perasional Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umumkantor, jasa surat menyurat, jasa pelayanan umumkantor, jasa peralatan dan perlengkapan	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
49	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	3	<b>Ada/Tidak</b> Definisi operasional Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meliputi Laporan tagihan air, tagihanlistri, tagihan internet, jasa konsultan IT yang tersedia	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
50	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	<b>Ada/Tidak</b> Definisi operasional Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu meliputi laporan jasa kebersihan	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
51	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	1	1	<b>Ada/Tidak</b> Definisi operasional Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dimaksud meliputi jasa supir dan jasa umum lainnya	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
52	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100	100	100	100	<b>Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>  <b>Jumlah Target Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  <b>X 100%</b>	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV

										Definisi operasional persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan peralatan danmesinlainnya			
53	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	14	14	14	14	14	<b>Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara</b> Definisi Operasional Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.	Laporan DPMPTS	12 Bulan	Eselon IV
54	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18	14	14	14	14	14	<b>Jumlah peralatan yang dipelihara</b> Definisi operasional Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan suatu aktivitas dengan tujuan untuk menjaga agar peralatan dan mesin selalu dalam kondisi baik meliputi pemeliharaan Komputer/PC, Notebook/laptop dan AC	Laporan DPMPTS	12 Bulan	Eselon IV

KEPALA DINAS

**HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c**  
**NIP : 19680928 200604 2 002**